

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

**OLEH :**

**RISKA DESTARIYANTI DWIPUTRI  
NIM. 1316131399**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN, 2017 M/ 1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jln. Raudan Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh: Riska Destariyanti Dwiputri Nim. 1316131399  
dengan judul: "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap  
Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di  
Indonesia".** Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran  
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak  
untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

**Bengkulu, 12 Juli 2017 M  
18 Syawal 1438 H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Asnaini, M.A.  
NIP. 19730412 199803 2 003**

**Yosy Arisandy, MM  
NIP. 19850801 201403 2 001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu**

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”**, oleh: **Riska Destariyanti Dwiputri Nim. 1316131399**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **18 Agustus 2017 / 25 Dzul-Qaidah 1438**

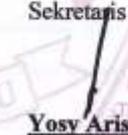
Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).

**Bengkulu, 22 Agustus 2017 M**

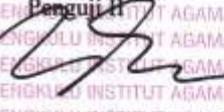
**29 Dzul-Qaidah 1438 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua  
  
**Dr. Anaini, MA**  
NIP. 197304121998032003

Sekretaris  
  
**Yosy Arisandy, MM**  
NIP. 198508012014032001

Penguji I  
  
**Andang Sunarto, Ph. D**  
NIP. 197611242006041002

Penguji II  
  
**Idwal B. MA**  
NIP. 198307092009121005

Mengetahui,  
Dekan  
  
**Dr. Anaini, MA**  
NIP. 197304121998032003

## NOTA

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.  
(Q.5 Ar-Rahman)

Barang siapa yang mengajak pada kebaikan dia kan memperoleh pahala atas perbuatan baiknya itu serta pahala orang yang mengikutinya dan melaksanakan kebaikan dengan tanpa dikurangi sedikitpun. Sebaliknya siapa yang mengajak pada kesesatan atau kemungkaran, dia akan mendapat dosa sebagai balasan atas perbuatannya sendiri (ditambah) dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun.  
(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika memang hal itu harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak (Aldus Huxley)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi suatu kegagalan, dari kegagalan yang satu kegagalan yang berikutnya tanpa kehilangan semangat  
(Winston Churchill)

Setiap manusia dilahirkan dengan nasib yang berbeda-beda, jangan mengeluh apalagi berputus asa. Yakinlah jika Allah SWT memberikan cobaan, maka kita pasti mampu menghadapi dan melewatinya  
(Riska Destariyanti Dwiputri)

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ✚ *Ibu dan ayah tercinta, terkasih, tersayang yaitu Ibu Elly Damayanti (Almih), Ayah Amrizal Tanjung dan Ibu Mis Murni yang senantiasa merawat, menjaga, dan mendidikku hingga sekarang aku dapat menyelesaikan skripsiku dengan baik. Terimakasih untuk kerja keras, usaha dan doa yang telah kalian berikan, inshaallah secepatnya aku akan mewujudkan impian serta cita-citaku dan mengukir air mata kebahagiaan diwajah kalian Ibu Ayahku.*
- ✚ *Saudara-saudaraku tersayang yaitu Mbak Vivi Donamaya Ikaputri, Adik Yolanda Citra Lestari Putri, Lusiana Trisia dan Zahara Natari yang telah menyemangati dan mendoakan disetiap kegiatanku, terimakasih yang tak terhingga untuk kalian.*
- ✚ *Sahabat- sahabat terbaik, terhebat dan seperjuangan yaitu Ellin Dwi Oktari, Ayu Puspitasari, Ilisa Tita Haryani, Ravia Fransischa, Tria Anggraini yang senantiasa membantuku, dari awal hingga akhir perkuliahanku. Terimakasih atas jiwa, raga dan pikiran dan setiap pengorbanan yang telah kalian lakukan untukku, will miss you sahabat.*
- ✚ *Sahabat terhebat dan terbaik sejak SMK hingga sekarang yaitu Rika Afriani, Debby Oktari, Shely Anggraini, dan Nova Herleni yang telah memberikan motivasi, semangat dan saran yang membangun, the best for you sahabat.*
- ✚ *Sahabat KKN yaitu Lesy Widya Ningsih, Ewita Isnaini, Meri Novianti dan Rida Kumalasari yang telah mendukung, menyemangati, mendoakanku dan I miss you sahabat.*
- ✚ *Sahabat-sahabat Ekonomi Syariah lokal D yaitu Okta, Gun, Rozi, Yogi Agenta, Arrobbial, Ely, Nanda, Pidian, Ardian, Edho, Ripan, Yesi, Zalena, Arif Budiman, Arif Rahman, Yogi Suardi, Iza, Deva, Siti, Herni, Husein, Tommy yang telah memberikan senyum tawa, dan semuanya yang dapat maupun tidak dapat kupahami, aku bangga memiliki kalian semua sahabat.*
- ✚ *Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah, yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu dan teman-teman seperjuangan saat ujian munaqasyah yaitu Cicing, Anis, Arum Deti, Eka dan Levi, tetap semangat kawan.*
- ✚ *Almamater yang telah menempahku.*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "**Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 9 Agustus 2017 M

16 Dzul-Qaidah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Riska Destarivanti Dwiputri  
NIM. 1316131399

Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia  
Oleh: Riska Destariyanti Dwiputri, NIM 1316131399

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan ISR serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan ISR, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder berupa *annual report* 8 BUS di Indonesia dari tahun 2012-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *ISR* dengan nilai signifikan sebesar  $0.238 > \alpha$  (0.05). Dari hasil uji parsial ditemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *ISR* dengan nilai signifikan sebesar  $0.129 > \alpha$  (0.05), ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *ISR* dengan nilai signifikan sebesar  $0.471 > \alpha$  (0.05) dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *ISR* dengan nilai  $0.363 > \alpha$  (0.05). Hasil uji determinasi ( $R^2$ ) didapatkan nilai *R square* ( $R^2$ ) sebesar 0.045 dengan persentase sebesar 4.5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian yang dilakukan peneliti.

Kata kunci: *good corporate governance, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan direksi, pengungkapan Islamic social reporting*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Kedua Orang tua Ibu Elly Damayanti (Almh), Ayah Amrizal Tanjung dan Ibu Mis Murni yang telah mendo'akan kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Asnaini, M.A, selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan arahan, motivasi, dan ilmu yang bermanfaat.
4. Idwal B, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah mengajarkan untuk menjadi yang lebih baik.
5. Yosy Arisandy, MM selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan pelajaran dan ilmu dengan sangat ikhlas.

7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan pelayanan yang terbaik
8. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 9 Agustus 2017 M  
16 Dzul-Qaidah 1438 H

**Riska Destariyanti Dwiputri**  
NIM. 1316131399

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan produk jasa perbankan yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat sekitar. Konsep syariah mempertimbangkan keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat, mencari keberkahan Allah, dan mencapai kesuksesan.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maa'un : 1-7, yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا  
تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ  
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya’, dan enggan (memberikan) bantuan.” (Al-Ma’un 1-7)

Maksud ayat tersebut adalah, dalam Islam manusia merupakan khalifah dimuka bumi, sehingga manusia juga harus menyemarakkan kebaikan kepada sesama makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, kesempurnaan iman seorang muslim tidak dapat hanya dicapai dengan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 11

hubungan vertikal kepada Allah SWT saja, tetapi juga harus dibarengi dengan hubungan yang baik dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Dalam dunia perbankan, penting bagi perbankan syariah untuk mengungkapkan baik *financial* maupun *non financial* dalam laporan tahunannya. Pada laporan tahunannya, perbankan syariah menerapkan konsep pengungkapan yang berdasar pada *Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), diantaranya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial.<sup>2</sup>

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia, termasuk lembaga perbankan syariah. Menurut Dusuki bahwa pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor diantaranya; perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah yang meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu adanya prinsip ketaatan pada perintah Allah dan Khalifah, yang terakhir adanya prinsip atas kepentingan umum, terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan dan menerapkan standar tanggung jawab sosial dengan

---

<sup>2</sup> Ari Purwanti, *Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa pada Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi dan keuangan Islam Vol. 4, No. 2 Tahun 2016, dikutip dari (<http://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/viewfile/63/60>, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2017, Pukul 14.12 WIB)

<sup>3</sup> Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, *Islam dan Tanggung Jawab Sosial (Studi: Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*, Jurnal dikutip dari (<http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5083>, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.50 WIB)

proses yang sistematis dan sejalan dengan usaha-usaha masyarakat, konsumen, dan pemerintah.<sup>4</sup>

Ide mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini semakin diterima secara luas.<sup>5</sup> “Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR).”<sup>6</sup>

ISR adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual.<sup>7</sup> ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.<sup>8</sup> ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa, kemudian dikembangkan lebih ekstensif oleh Othman *et al.* Menurut Hanifah terdapat keterbatasan dalam pelaporan konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang tidak hanya membantu para pengambil keputusan Muslim tetapi juga untuk membantu perusahaan,

---

<sup>4</sup>Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 54-55

<sup>5</sup>Edi Suharto, *Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 101

<sup>6</sup>Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, *Islam dan...*, h.10

<sup>7</sup>Wardaul Baidok dan Dina Fitriasia, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, Jurnal dikutip dari (<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/jestt/article/viewfile/3684/2509>, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2017, Pukul 14.15 WIB)

<sup>8</sup>Ari Purwanti, *Dewan Pengawas...*, h. 171

terutama perusahaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat.<sup>9</sup>

Standar pelaporan kinerja sosial yang bersifat syariah dikembangkan menggunakan *Islamic Sosial Reporting Index* (Indeks ISR). Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks global terdapat isu yang paling banyak dibicarakan yaitu keterkaitan antara CSR dengan GCG. Para ahli mengibaratkannya dengan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, yang membedakan adalah dari segi penekanannya, jika CSR penekanannya pada prinsip *responsibility* (tanggungjawab) yang berorientasi kepada para *stakeholders*.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama GCG yaitu *responsibility*, sedangkan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan prinsip *transparansi* dan

---

<sup>9</sup>Septi Widiawati, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat di Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011*, Skripsi dikutip dari (<http://eprints.undip.ac.id/37231/1/widiawati.pdf>, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, Pukul 17.14 WIB)

<sup>10</sup>Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, *Islam dan...*, h. 4

<sup>11</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility...*, h. 200-202

*akuntabilitas*.<sup>12</sup> Disisi lain menurut Baidok, salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah GCG.<sup>13</sup>

GCG didefinisikan oleh *Cadbury Committee* adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.<sup>14</sup> Menurut OECD adalah tata kelola yang melibatkan seperangkat hubungan manajemen korporasi, dewan (komisaris dan direksi), pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.<sup>15</sup>

Dalam laporan *World Bank* dijelaskan bahwa krisis ekonomi yang menimpa negara-negara ASEAN dan menyebabkan penurunan kinerja perbankan yang terjadi karena kegagalan penerapan GCG. Kegagalan penerapan GCG ini berasal dari sistem kerangka hukum yang masih lemah, kurangnya pengawasan dari dewan komisaris dan auditor, dan juga praktik perbankan.<sup>16</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Baird bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara

---

<sup>12</sup> Intan Gestari R.D, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Skripsi dikutip dari (<http://eprints.ums.ac.id/32066/9/10%20naskah%20publikasi.pdf>, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.50 WIB)

<sup>13</sup> Wardaul Baidok dan Dina Fitrisia, *Pengaruh Good...*, h. 1022

<sup>14</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility...*, h. 180

<sup>15</sup> Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi: Panduan Penerapan dan Pengembangan*, (Jakarta: PPM, 2013), h. 51

<sup>16</sup> Astri Aprianingsih, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar pada BEI Periode 2011-2014*, Skripsi dikutip dari (<http://eprints.uny.ac.id/31985/1/skripsi.pdf>, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 11.45 WIB)

Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan GCG di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan milik pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Dengan buruknya pelaksanaan GCG maka tingkat kepercayaan dari pemilik modal dan masyarakat akan turun.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan mengenai masalah, kasus-kasus dan skandal-skandal ekonomi yang timbul akibat penerapan GCG yang tidak sesuai, maka menarik untuk diteliti mengenai sejauh mana keberhasilan lembaga perbankan syariah dalam menerapkan GCG serta pengaruhnya terhadap pengungkapan ISR. Perusahaan harus melakukan pengungkapan terhadap aspek-aspek kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan keberlanjutan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas terhadap para investor dan *stakeholders*. Sehingga penerapan konsep GCG diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini unsur internal GCG yang digunakan diantaranya yaitu komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Keberadaan dewan komisaris independen pada BUS dapat meningkatkan

---

<sup>17</sup> Azhar Maksu, *Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia*, dikutip dari ([http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30619330/ppgb\\_2005\\_azhar\\_maksum.pdf](http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30619330/ppgb_2005_azhar_maksum.pdf)), pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2017, Pukul 14.20 WIB)

<sup>18</sup> Intan Gestari R.D, *Pengaruh Good Corporate...*,

perlindungan bagi kepentingan pemangku khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas dan menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.<sup>19</sup> Menurut Nur Anisa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, dimana semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka semakin baik pula fungsi pengawasan dalam perusahaan, hal tersebut berarti akan lebih banyak tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan.<sup>20</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, dan SK Dir BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, kepengurusan bank syariah terdiri atas dewan komisaris dan direksi, di samping itu bank wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>21</sup>

Keberadaan DPS dalam bank syariah merupakan penentu dalam pelaksanaan seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan

---

<sup>19</sup>Wardaul Baidok dan Dina Fitriasia, *Pengaruh Good...*, h. 1024

<sup>20</sup>Nur Anisa, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2012)*, dikutip dari [http://digilib.uinsuka.ac.id/21239/2/12820029\\_babi\\_ivatauv\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/21239/2/12820029_babi_ivatauv_daftar-pustaka.pdf), pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, pukul 15.32 WIB

<sup>21</sup>Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), h. 212

peraturan dan prinsip Islam. Semakin banyak jumlah DPS dalam operasi usaha bank syariah, semestinya dapat memperluas pengungkapan sebagai sarana informasi bagi *stakeholders* perusahaan.<sup>22</sup>

Menurut Wahyu Widarjo, dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan bank. Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Selain itu, dewan direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program yang berhubungan dengan pihak luar perbankan.<sup>23</sup> Siregar dan Bachtiar berpendapat bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar akan memudahkan untuk mengontrol CEO dan proses monitoring akan lebih efektif, sehingga akan mendorong tingkat pengungkapan ISR.<sup>24</sup>

Beberapa penelitian yang dilakukan berhubungan dengan pengaruh GCG terhadap pengungkapan ISR diantaranya penelitian Wardatul Baidok tahun 2016 berjudul Pengaruh GCG terhadap Pengungkapan Indeks ISR pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. Hasil penelitian komposisi DKI dan DPS berpengaruh signifikan terhadap ISR pada BUS di Indonesia.<sup>25</sup> Berbeda dengan penelitian Amirul tahun 2013 yang menyatakan ukuran DPS tidak

---

<sup>22</sup>Ari Purwanti, *Dewan Pengawas...*, h. 172

<sup>23</sup> Dita Rohma, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility di dalam laporan Sustainability* (Studi empiris pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013), Skripsi dikutip dari (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30172/1/dita%20rohman-feb.pdf>, pada hari Sabtu, 24 Desember 2016, Pukul 13.50 WIB)

<sup>24</sup> Vina Septiana Permatasari, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Indeks Islamic Social Reporting pada Perusahaan yang Terdaftar dalam JII Tahun 2011-2013*, dikutip dari (<https://www.researchgate.net/publication/31197026>), pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, Pukul 13.43 WIB

<sup>25</sup>Wardaul Baidok dan Dina Fitriasia, *Pengaruh Good...*, h. 1034

berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia.<sup>26</sup> Vina tahun 2015 dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Indeks ISR, menyatakan bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan ISR.<sup>27</sup>

Dari beberapa penelitian diatas masih terdapat perbedaan hasil penelitian, ditambah dengan masalah GCG yang pemaparannya belum sesuai dengan yang seharusnya dan juga mengenai praktik pengungkapan tanggung jawab sosial yang semakin marak, maka penelitian mengenai praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kajian Islam atau yang biasa disebut *Islamic Social Reporting* (ISR) ini penting dilakukan karena untuk mendukung laporan kinerja sosial perusahaan berdasarkan prinsip syariah khususnya di Indonesia, dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>26</sup>Amirul Khoirudin, *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Accounting Analysis Journal, Jurnal dikutip dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/2919>, diakses pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017, Pukul 11.15 WIB.

<sup>27</sup>Vina Septiana Permatasari, *Pengaruh Ukuran...*, h. 115

1. Apakah komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia?
5. Seberapa besar pengaruh komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Secara teoritis

Memperluas wawasan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur untuk penelitian lanjutan dan menambah informasi bagi pembaca mengenai pelaporan perbankan syariah, peraturan atau wacana dan pelaksanaan operasional perusahaan yang sesuai dengan prinsip Islam dan sesuai dengan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW.

## 2. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Institusi Ekonomi dan Keuangan Islam serta para *Stakeholders* dan karyawan perusahaan mengenai aturan, tata kelola perusahaan, hukum, standar dan organisasi untuk menciptakan dan meningkatkan sistem pengendalian yang efektif, efisiensi, berkesinambungan, baik dan juga bersih. serta bertujuan untuk mencapai kemaslahatan didunia maupun diakhirat.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang ditulis oleh Dita dengan judul penelitian Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR di dalam Laporan *Sustainability* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Listing di BEI Tahun 2010-2013). Hasil penelitian, dewan komisaris independen (DKI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di laporan *sustainability*.<sup>28</sup> Perbedaan terletak pada variable dependen, Dita menggunakan CSR, sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan ISR. Persamaan terletak pada dewan komisaris independen sebagai variabel independen dari GCG.

Penelitian Amalia tahun 2013 berjudul Pengaruh Indikator GCG dan *Profitabilitas* Terhadap Pengungkapan CSR. Hasil menunjukkan ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan, sementara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan

---

<sup>28</sup> Dita Rohma, *Pengaruh Mekanisme...*,

profitabilitas berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR.<sup>29</sup> Persamaan terletak pada DKI sebagai indikator GCG, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan ISR sebagai variabel dependen.

Penelitian selanjutnya oleh Ahmad dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan ISR yang Terdaftar pada JII. Hasil menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.<sup>30</sup> Persamaan penelitian terletak pada variabel dependennya yang sama-sama menggunakan ISR, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu GCG.

Penelitian oleh Intan dengan judul Pengaruh GCG terhadap pengungkapan ISR pada BUS di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan FRKA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan komposisi DKI, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran DPS, FRDPS, dan kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR.<sup>31</sup> Perbedaan terletak pada periode yang digunakan, penelitian Intan menggunakan periode tahun 2009-2013, sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan periode tahun 2012-2015, penelitian yang akan dilakukan juga

---

<sup>29</sup> Amalia Ramdhaningsih, *Pengaruh Indikator Good Corporate Governance pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility*, E-Jurnal Akuntansi dikutip dari (<http://file:///c:/users/2017/downloads/5515-1-8837-1-10-20130511.pdf>, pada hari Kamis, 5 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB)

<sup>30</sup> Ahmad Amin Nasir, *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada JII*, Jurnal dikutip dari ([http://digilib.uin-suka.ac.id/19166/2/08390164\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/19166/2/08390164_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf), pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.55 WIB)

<sup>31</sup> Intan Gestari R.D, *Pengaruh Good...*,

menambahkan dewan direksi sebagai alat ukur. Persamaan penelitian terletak pada variabel yang digunakan.

Penelitian oleh Nur tahun 2014 berjudul pengaruh GCG dan Ukuran Perusahaan Terhadap pengungkapan ISR (Studi pada perbankan syariah di Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan proporsi DKI dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan ukuran DPS tidak terbukti mempengaruhi pengungkapan ISR.<sup>32</sup> Persamaan terletak pada variabel yang digunakan, perbedaannya penelitian yang akan dilakukan menambahkan ukuran dewan direksi sebagai alat ukur dan juga perbedaan terletak pada periode yang digunakan.

Penelitian Baidok dan Dina tahun 2016 yang berjudul Pengaruh GCG terhadap Pengungkapan Indeks ISR pada BUS Periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris, FRKA berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR, sedangkan KDKI, DPS, FRDPS berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada BUS di Indonesia. Persamaan terletak pada variabel yang digunakan, tetapi dengan perbedaan penambahan dewan direksi sebagai alat ukur GCG dan menambah periode penelitian dari tahun 2012-2015.<sup>33</sup>

Penelitian Amirul tahun 2013 *Corporate Governance* dan Pengungkapan ISR pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

---

<sup>32</sup> Nur Anisa Dipika, *Pengaruh Good...*,

<sup>33</sup> Wardaul Baidok dan Dina Fitriisa, *Pengaruh Good...*, h. 1033-1034

perbankan syariah di Indonesia.<sup>34</sup> Perbedaannya penelitian yang akan diuji tidak menggunakan dewan komisaris melainkan KDKI dan dewan direksi sebagai pendamping DPS, data periode tahun 2012-2015. Persamaan terletak pada variabel yang digunakan.

Penelitian Vina tahun 2015 berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Indeks ISR pada Perusahaan yang Terdaftar dalam JII Tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan ISR. Sedangkan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan ISR.<sup>35</sup> Persamaan terletak pada variabel dependen dan dewan direksi sebagai indikator GCG, perbedaan terletak pada populasi yang digunakan, dimana penelitian yang akan dilakukan menggunakan BUS di Indonesia.

---

<sup>34</sup>Amirul Khoirudin, *Corporate Governance...*, h. 232

<sup>35</sup>Vina Septiana Permatasari, *Pengaruh Ukuran...*, h. 119

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara yang membedakan pengertiannya dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>36</sup> Istilah lain yang juga berkaitan dengan ini adalah Unit Usaha Syariah (UUS) yakni unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah).<sup>37</sup>

##### 2. *Islamic Social Reporting*(ISR)

*Islamic social reporting* (ISR) adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja social yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Haniffah menyarankan bahwa

---

<sup>36</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 11

<sup>37</sup> Andi, Soesanto dikutip dari (<http://tipserbaseri.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-kegiatan-bank-umum.html>), pada 16 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB)

pengungkapan informasi penuh dalam laporan tahunan yang relevan dan handal akan membantu para pemangku kepentingan Muslim dalam mengambil keputusan sosial, ekonomi dan agama serta membantu manajemen perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.<sup>38</sup>

#### **a. Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Pengungkapan secara sedarhana dapat diartikan sebagai pengeluaran Informasi. Amurwani memaparkan bahwa pengungkapan dapat dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.<sup>39</sup>

Pengungkapan ISR dapat diidentifikasi dengan menggunakan indeks ISR. Indeks ISR mengungkapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti zakat, status kepatuhan

---

<sup>38</sup> Wardaul Baidok dan Dina Fitriasia, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, Jurnal dikutip dari (<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/jestt/article/viewfile/3684/2509>, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2017, Pukul 14.15 WIB)

<sup>39</sup> Septi Widiawati, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009 – 2011*, Skripsi dikutip dari (<http://eprints.undip.ac.id/37231/1/widiawati.pdf>, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, Pukul 17.14 WIB)

syariah, dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti sedekah, wakaf, qardul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.<sup>40</sup>

Indeks ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fitria dan Hartati yang mengelompokkan Indeks ISR menjadi enam indikator pengungkapan yang masing-masing terdapat berbagai item, yaitu:<sup>41</sup>

1) Investasi dan Keuangan

Item yang masuk dalam indikator investasi dan keuangan adalah mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan transaksi yang diharamkan oleh Islam, serta item mengenai kebijakan organisasi untuk menangani nasabah yang bermasalah.

2) Produk dan Jasa

Indikator kedua pada indeks ISR adalah produk dan jasa. Item-item pada indikator ini mengenai pengungkapan terhadap complain atau keluhan nasabah.

3) Tenaga Kerja

Pada indikator tenaga kerja, indikator ini tetap menekankan pada prinsip-prinsip Islam yang meliputi karakteristik pekerja, pendidikan dan pelatihan dan persamaan kesempatan.

---

<sup>40</sup> Intan Gestari R.D, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Skripsi dikutip dari (<http://eprints.ums.ac.id/32066/9/10%20naskah%20publikasi.pdf>, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.50 WIB)

<sup>41</sup> Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, *Islam dan Tanggung Jawab Sosial (Studi: Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*, Jurnal dikutip dari (<http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5083>, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.50 WIB)

4) Sosial

Indikator sosial merupakan indikator yang erat hubungannya dengan konsep tanggungjawab sosial, pada indikator sosial ini sebagian besar difokuskan pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip Islam seperti saddaqaah, waqaf, qardul hasan, serta kegiatan amal lainnya.

5) Lingkungan

Indikator lingkungan pada indeks ISR memiliki item yang berkaitan dengan menekankan pengungkapan terhadap aktivitas dan besarnya dana yang dikeluarkan organisasi untuk aktivitas lingkungannya.

6) Tata Kelola Organisasi

Indikator terakhir adalah tata kelola organisasi. pada item ini pengungkapannya terkait pada transaksi haram (*unlawful transactions*).

Indeks ISR dalam penelitian ini mengadopsi indeks dari penelitian Othman *et al* dan juga penelitian Fitria dan hartanti yang terdiri dari 43 item pengungkapan. Penilaian item pengungkapan ISR berupa nilai (skor) yang diperoleh dari analisis tingkat pengungkapan ISR. Penilaian indeks ISR dilakukan dengan menggunakan *scoring* dari nilai 0-1, dimana nilai 0 jika tidak ada pengungkapan terkait item dan nilai 1 jika ada pengungkapan terkait item tersebut. Untuk menghitung besarnya indeks ISR yang telah selesai dilakukan pengidentifikasian dengan membagi antara jumlah skor yang dipenuhi dengan jumlah skor maksimum, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pengungkapan ISR} = \frac{\text{Jumlah item pengungkapan}}{\text{Jumlah item maksimum}}$$

Pada umumnya di setiap perusahaan, pengungkapan atau pelaporan (*disclosure*) merupakan pemberian informasi atas konsekuensi atau bentuk pertanggungjawaban mengenai aktifitas yang

telah dilakukan oleh perusahaan. Noegraheni menyatakan bahwa bagi pihak di luar manajemen, laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka melihat kondisi perusahaan tersebut. Informasi ini harus diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan atau dalam media lainnya seperti web perusahaan. Luasnya informasi yang dapat di peroleh akan sangat tergantung pada tingkat pengungkapan dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.<sup>42</sup>

#### **b. Perkembangan *Islamic Social Reporting***

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan yang bersifat syariah yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR). Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam Islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan masyarakat dan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas perusahaan. Hal Ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Tria Karina Putri, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2012*, Skripsi dikutip dari ([http://eprints.undip.ac.id/42914/1/05\\_putri.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42914/1/05_putri.pdf), diakses pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017, Pukul 10.45 WIB)

<sup>43</sup> Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, *Islam dan...*, h. 10

Perkembangan Indeks ISR di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan perkembangan Indeks ISR di negara-negara Islam lain, dimana ISR telah menjadi bagian pelaporan organisasi syariah. Studi yang dilakukan Fitria dan Hartati menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial pada beberapa bank syariah di Indonesia masih terbatas atau hanya dapat memenuhi 50% dari skor maksimal jika semua item diungkapkan secara sempurna pada indeks ISR. Pentingnya pengungkapan ISR karena menunjukkan akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat, namun apa yang sebenarnya mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan ISR belum diungkapkan secara empiris. Meskipun studi tentang pelaporan sosial telah banyak diteliti, namun penelitian tersebut mengabaikan pentingnya *Islamic Social Reporting* (ISR).<sup>44</sup>

### **3. Good Corporate Governance(GCG)**

#### **a. Pengertian Good Corporate Governance**

Secara umum GCG berkaitan dengan upaya menarik minat investor untuk berinvestasi pada suatu negara, baik dalam investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*undirect investment*). Melalui mekanisme GCG, akan mendorong tumbuhnya *check and balance* dilingkungan manajemen, khususnya

---

<sup>44</sup> Ali Rama dan Meliawati, *Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012*, dikutip dari (<http://eprints.ums.ac.id/47748/17/naskah%20publikasi%20%282%29.pdf>, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.51 WIB)

dalam memberikan perhatiannya kepada kepentingan *shareholders* dan *steakholders*.<sup>45</sup>

Menurut Bank Dunia, GCG adalah aturan, standar, dan organisasi dibidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Sementara Syakhroza mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>46</sup>

Dalam literatur yang lain disebutkan juga bahwa GCG berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *steakholders* lain.<sup>47</sup>

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu tata kelola industri perbankan yang sehat yang berlandaskan kepada lima prinsip dasar pengelolaan perbankan sehingga dapat meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan

---

<sup>45</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 177-178

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 243

<sup>47</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 77

*steakholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*Code of conduct*) yang berlaku pada industri perbankan. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar GCG, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Transparansi (*Tansparancy*), diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) Independensi (*Independency*), yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- 5) Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *steakholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya kegagalan beberapa lembaga keuangan Islam, kebutuhan mengembangkan tata kelola yang efektif dan efisien dianggap krusial. Mengingat hal ini beberapa lembaga infrastruktur internasional didirikan dengan alasan mendukung sektor keuangan Islam.<sup>49</sup>

Beberapa lembaga ini mencakup *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic financial service board* (IFSB). Dua lembaga pertama ini didirikan secara khusus, untuk memperkuat tata kelola perusahaan di lembaga

---

<sup>48</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia ...*, h.244-245

<sup>49</sup> Wilson Arafat, *Manajemen Perbankan Indonesia: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 12

keuangan Islam dan lembaga-lembaga yang lain menyediakan infrastruktur pendukung implementasi keuangan Islam.<sup>50</sup>

#### **b. Dasar Hukum GCGPerbankan Syariah**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, perbankan syariah diwajibkan untuk menerapkan GCG dalam kegiatan usahanya, kewajiban ini ditentukan dalam Pasal 34 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### **c. Tujuan penerapan GCGPerbankan Syariah**

Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Dari peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah dan UUS, yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, *International Shari'ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA), Sitem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi/ISRA*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 822-823

<sup>51</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum...*, h.243-257

- 1) Mewujudkan tata kelola industri perbankan syariah yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran.
- 2) Membangun industri perbankan yang sehat dan tangguh.
- 3) Memenuhi prinsip syariah, sehingga reputasi perbankan syariah tetap terjaga.
- 4) Meningkatkan perlindungan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha perbankan syariah (*stakeholders*).
- 5) Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.
- 6) Dalam rangka melakukan *check and balance* diantara kelembagaan perbankan syariah.
- 7) Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG melalui *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Menurut Herman Darmawi, penerapan GCG sangat penting bagi dunia perbankan karena lembaga perbankan memiliki fungsi yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Pertama, bank berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Perbankan dalam perekonomian modern merupakan industri jasa yang dominan dan menunjang hampir seluruh program pembangunan ekonomi, karena kegiatan perekonomian itu dijalankan dengan uang. Kedua, bank sebagai *agent of trust* yaitu lembaga yang menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan jasa yang baik kepada masyarakat. Ketiga, bank juga berfungsi untuk menjaga kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.<sup>52</sup>

#### d. Peran Bank Indonesia dalam Mewujudkan GCG

---

<sup>52</sup> Astri Aprianingsih, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014*, Skripsi dikutip dari (<http://eprints.uny.ac.id/31985/1/skripsi.pdf>, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 11.45 WIB)

Keterpurukan luar biasa yang diakibatkan oleh krisis multidimensi dan krisis keuangan yang melanda dunia telah menyadarkan berbagai pelaku ekonomi bahwa salah satu faktor fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip GCG yang diabaikan. Hal ini tidak akan terjadi atau dapat dieliminasi jika perbankan nasional dapat menjalankan praktik-praktik GCG dengan keteguhan hati.

Sebagaimana Daniri menjelaskan bahwa dengan GCG, dimungkinkan terbentuknya sistem *check and balances* yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya salah urus dan salah pakai kekayaan oleh institusi, seperti yang telah terjadi di perbankan nasional. Dengan demikian, berkembang pendapat bahwa tidak ada pilihan lain kecuali perbankan nasional harus melihat GCG bukan sebagai aksesoris belaka, melainkan suatu sistem nilai dan praktik terbaik yang sangat fundamental jika memang masih berharap kasus-kasus yang menyedihkan yang pernah terjadi di dunia perbankan tidak terulang kembali.<sup>53</sup>

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pada dasarnya peran Bank Indonesia dalam mewujudkan GCG di dunia perbankan adalah sama dengan peran yang dilakukan oleh lembaga pengawas lainnya, dimana perannya seperti membuat peraturan untuk memuat prinsip-prinsip GCG di lembaga-lembaga syariah.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 522-523

<sup>54</sup> Wilson Arafat, *Manajemen Perbankan...*, h. 23-25

## e. Indikator *Good Corporate Governance*

### 1) Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dimaksud komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki:<sup>55</sup>

- a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi.
- b. Hubungan keuangan dan hubungan kepemilikan saham dengan bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan komisaris independen anggotanya tidak berasal dari dewan direksi ataupun pemegang saham, karena dewan komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Proporsi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris. Dewan komisaris independen diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>56</sup>

Proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan mempengaruhi fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin baik pula fungsi pengawasan dalam perusahaan. Oleh karenanya, semakin banyak

---

<sup>55</sup> PBI Nomor 11/ 33 /PBI/ 2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 1 ayat (9).

<sup>56</sup> Dominikus Oktavianto Kresno Widagdo, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi, volum 3, Semarang , 2014, h. 2

jumlah dewan komisaris independen maka semakin baik pula fungsi pengawasan dalam perusahaan, hal tersebut berarti akan lebih banyak tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan.<sup>57</sup>

Komposisi dewan komisaris Independen diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan total anggota dewan komisaris secara keseluruhan dalam laporan tata kelola perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan. Jika dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komposisi DKI} = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

## 2) Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan badan independen yang diberikan tugas untuk mengarahkan, meninjau, dan menyupervisi aktivitas-aktivitas lembaga keuangan Islam demi alasan mematuhi syariah, serta mengeluarkan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan perbankan dan keuangan Islam.<sup>58</sup>

Tugas dan tanggung jawab DPS mengacu pada Peraturan Bank

---

<sup>57</sup> Nur Anisa, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2012)*, dikutip dari [http://digilib.uinsuka.ac.id/21239/2/12820029\\_babi\\_ivatauv\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/21239/2/12820029_babi_ivatauv_daftar-pustaka.pdf), pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, pukul 15.32 WIB

<sup>58</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, *International Shari'ah...*, h. 842

Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah Bank Umum Syariah. DPS berperan penting dalam pengembangan bank syariah karena untuk menentukan tingkat kredibilitas bank syariah dalam menjamin *sharia compliance* dan juga sebagai salah satu pilar GCG bank syariah.<sup>59</sup>

Fungsi DPS dalam organisasi bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dawud menyampaikan bahwa sasaran dewan syariah adalah memandu lembaga keuangan syariah dalam menetapkan kebijakan dan peraturan sesuai syariah, menyetujui transaksi-transaksi lembaga keuangan syariah dari sisi hukum, serta menyiapkan kontrak-kontrak lembaga keuangan syariah sesuai

---

<sup>59</sup> Standar AAOIFI Sebagai Acuan Kepatuhan Bank Syariah, dikutip dari (<http://akuntansikeuangan.com/organisasi-standar-akuntansi-syariah-internasional-aaofii/>), pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2017, Pukul 14.15 WIB)

<sup>60</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung:Alfabeta, 2014), h.

dengan hukum Islam agar dapat digunakan dalam transaksi-transaksi mendatang.<sup>61</sup>

Sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004, mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah dijelaskan sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- b) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

DPS diukur dengan menghitung jumlah DPS dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tata kelola perusahaan dalam *annual report* masing-masing perusahaan.

### 3) Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan.<sup>62</sup> Direksi bank mayoritas wajib memiliki pengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank. Anggota direksi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. Setiap anggota direksi

---

<sup>61</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, *International Shari'ah...*, h. 848

<sup>62</sup> Zaki dan Arif, *Pengaruh Penghargaan dan Tipe Kepemilikan Bank Umum Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting*, Simposium Nasional Akuntansi XIX dikutip dari (<http://gondata.feb.unila.ac.id/gallery/wp-content/uploads/2016/08/aksr-049-camera-ready-fullpaper-edit-isr-final-version-full-paper.pdf>, pada hari Senin, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.50 WIB)

dilarang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat lainnya, dilarang merangkap jabatan, dan disamping itu direksi juga dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang akan mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.<sup>63</sup>

Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan menghitung jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan, yang terdapat dalam laporan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan masing-masing perusahaan.

#### **4. Pengaruh *Good Corporate Governace* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

##### **a. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan ISR**

Keberadaan dewan komisaris independen sebagai salah satu fungsi dalam tata kelola perusahaan yang dalam mengevaluasi strategi perusahaan dan mengawasi manajemen diharapkan dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan CSR yang lebih luas dalam rangka mewujudkan prinsip GCG yaitu responsibility.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), h. 213-214

<sup>64</sup> Dita Rohma, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility di dalam laporan Sustainability*, Skripsi dikutip dari (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30172/1/dita%20rohmah-feb.pdf>, pada hari Sabtu, 24 Desember 2016, Pukul 13.50 WIB)

Penelitian Sudana dan Arlindania tahun 2011 menyimpulkan bahwa komisaris independen akan mendukung kegiatan- kegiatan perusahaan dalam melaksanakan dan pengungkapan aktivitas CSR yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dan mengungkapkannya di laporan tahunan perusahaan.<sup>65</sup> Dengan kata lain semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka semakin baik pula fungsi pengawasan dalam perusahaan, hal tersebut berarti akan lebih banyak tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan.<sup>66</sup>

#### **b. Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR**

Dewan pengawas syariah mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Penelitian Amirul tahun 2013 menemukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan *ISR*, dimana mengenai jumlah dewan pengawas syariah, jika semakin banyak jumlah DPS maka akan dapat meningkatkan level pengungkapan.<sup>67</sup>

#### **c. Pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan ISR**

---

<sup>65</sup> Dita Rohma, *Pengaruh Mekanisme...*,

<sup>66</sup> Nur Anisa, *Pengaruh Good...*,

<sup>67</sup> Amirul Khoirudin, *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Accounting Analysis Journal, Jurnal dikutip dari (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/article/view/2919>, diakses pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017, Pukul 11.15 WIB)

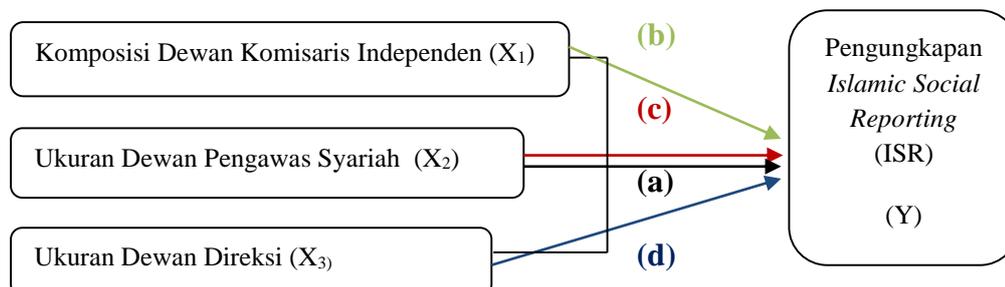
Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengandengan dewannya untuk mengelolah sumber daya secara lebih baik. Agar terciptanya *corporate governance* yang efektif pada perbankan syariah maka, anggota dewan direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung, selain itu mereka juga harus memiliki kesadaran yang penuh atas segala resiko, memiliki kemampuan untuk mengelolah resiko seiring dengan kompleksitas perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap ISR, dikarenakan bahwa dewan direksi organ perseroan yang berwewenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, dengan demikian dewan direksi merupakan suatu bagian terpenting dalam *corporate governance*, dimana dewan direksi tersebut akan menentukan tingkat pengungkapan pada laporan sosial perusahaan berdasarkan entitas syariah.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Amalia Ramdhaningsih, *Pengaruh Indikator Good Corporate Governance Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility*, E-Jurnal Akuntansi dikutip dari

## B. Kerangka Berpikir



Sumber: Siregar, Syofian<sup>69</sup>

Gambar 2.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar 2.1, maka dapat digambarkan hubungan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, baik secara parsial maupun secara simultan sebagai berikut:

### Keterangan:

- (a) Menunjukkan adanya pengaruh yang positif signifikan terhadap uji simultan antara variabel X<sub>1</sub> (Komposisi dewan komisaris independen), X<sub>2</sub> (Ukuran dewan pengawas syariah), X<sub>3</sub> (Ukuran dewan direksi) terhadap Y (Pengungkapan *Islamic social reporting*)
- (b) Menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara variabel X<sub>1</sub> (Komposisi dewan komisaris independen) terhadap Y (Pengungkapan *Islamic social reporting*)

(<http://file:///c:/users/2017/downloads/5515-1-8837-1-10-20130511.pdf>, pada hari Kamis, 5 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB)

<sup>69</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 301

- (c) Menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara variabel  $X_2$  (Ukuran dewan pengawas syariah) terhadap Y (Pengungkapan *Islamic social reporting*)
- (d) Menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara variabel  $X_3$  (Ukuran Dewan Direksi) terhadap Y (Pengungkapan *Islamic social reporting*)

### **C. Hipotesis Penelitian**

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1 : Komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia
- 2 : Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia
- 3 : Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia

4: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *asosiatif* yang mana penelitian ini menjelaskan pengaruh anatara komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *Islamic social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2015. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena yang objektif dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel-sampel tertentu dalam penelitian.

#### **B. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dari tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 9 Agustus 2017.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Data diperoleh berdasarkan data laporan keuangan masing-masing perusahaan selama 4 tahun berturut-turut yang berasal dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan website masing-masing perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 8

Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2012-2015 yang dikalikan 4 tahun, sehingga diperoleh 32 data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

#### **D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara atau data yang berasal dari tangan kedua, data penelitian ini diambil berdasarkan laporan tahunan (*annual report*) perbankan syariah pada periode 2012-2015 yang dipublikasikan melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan website masing-masing perusahaan dan studi pustaka atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia.

#### **E. Variabel dan Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah *Islamic Social reporting*. *Islamic Social Reporting* adalah pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual dan keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Sedangkan variabel independen adalah komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi.

Dewan komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas atau dengan kata lain komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Dewan pengawas syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data seperti nilai *maksimum*, *minimum*, *mean*, dan *standar deviasi*.

### **2. Pengujian Kualitas Data**

#### **a. Normalitas data**

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah sampel data berasal dari populasi normal atau tidak.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov Smirnov* untuk menguji normalitas data, dengan ketentuan jika nilai signifikansi  $> \alpha$  (0.05) maka data berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi  $< \alpha$  (0.05) maka data tidak berdistribusi normal.<sup>71</sup>

#### **b. Homogenitas Data**

---

<sup>70</sup> Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 153

<sup>71</sup> Getut Pramesti, *Statistika Lengkap Secara Teori dan Aplikasi dengan SPSS 23*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 67

Uji homogenitas data adalah pengujian mengenai sama tidaknya varians-varians dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y tersebut homogen. Ketentuan, jika nilai signifikansi  $> \alpha$  (0.05) maka data tersebut homogen dan sebaliknya jika nilai signifikansi  $< \alpha$  (0.05) maka data tersebut tidak homogen.<sup>72</sup>

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a) Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji dalam model regresi dengan ditemukan adanya korelasi antar variable independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Ketentuan multikolonieritas adalah nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)  $> 10$  dan nilai tolerance  $< 0.10$ . Sebaliknya jika nilai VIF  $< 10$  dan nilai tolerance  $> 0.10$  maka tidak terjadi asumsi multikolinearitas.<sup>73</sup>

#### b) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot*.

---

<sup>72</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 337

<sup>73</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis...*, h. 106

Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>74</sup>

Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### c) Autokorelasi

Menurut Nachrowi dan Hardius, auto korelasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series*, artinya kondisi sekarang dipengaruhi waktu lalu. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi.<sup>75</sup> Auto korelasi tidak akan terjadi jika nilai *Durbin Watson* berada diantara angka 1 hingga 4.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis...*, h.139

<sup>75</sup> Tomy Wijaya, *Cepat Menguasai SPSS 19 Untuk Olah dan Interpretasi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2011), h. 121

<sup>76</sup> Dwi Priyanto, *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariat dengan SPSS*, (Yogyakarta: Media, 2011), h. 60

#### 4. Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis yang telah disajikan, maka digunakan rumus analisis sebagai berikut:

##### a. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang digunakan untuk melakukan prediksi permintaan di masa yang akan datang, berdasarkan data dimasa lalu untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen) terhadap satu variabel tak bebas (dependen).<sup>77</sup> Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan Y maka alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16, dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Keterangan:

Y = Pengungkapan ISR

$\beta_0$  = Koefisien konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel terikat yang didasarkan pada variabel bebas

$X_1$  = Komposisi dewan komisaris independen

$X_2$  = Ukuran dewan pengawas syariah

---

<sup>77</sup> Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 405

$X_3 =$  Ukuran dewan direksi

$e_i =$  Error

**b. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F dikenal dengan uji serentak /uji simultan /uji model dan atau uji anova, yaitu uji untuk menguji apakah keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai *sig*  $\alpha < 0.05$  maka hipotesis diterima, dan sebaliknya.<sup>78</sup>

**c. Uji t (Uji Parsial)**

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dengan ketentuan apabila nilai nilai *sig* kurang dari  $\alpha$  (0.05) maka hipotesis diterima, dan sebaliknya.

**d. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran yang mengatakan seberapa baik garis regresi sampel yang cocok atau sesuai dengan datanya.<sup>79</sup> Pada model regresi linear berganda ini akan terlihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya nilai *Adjusted R square* pada hasil uji. Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan antar variabel dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel 3.1**

---

<sup>78</sup> Syofian Siregar, *Statistik Parametrik...*, h. 404

<sup>79</sup> Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 48

### Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan

No	Nilai Korelasi ( $r$ )	Tingkat Hubungan
1	0,00 - 0,199	Sangat Lemah
2	0,20 - 0,399	Lemah
3	0,40 - 0,599	Cukup
4	0,60 - 0,799	Kuat
5	0,80 - 0,100	Sangat Kuat

Sumber: Siregar, Syofian<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Syofian Siregar, *Statistik Parametrik...*, h. 337

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Bank Umum Syariah**

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.<sup>81</sup>

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung

---

<sup>81</sup> Amir Machmud dan Rukmana *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.

dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syari'at Islam. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya.

IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam. Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim *Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan

Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah. Semoga saja UU No.10 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada disini seperti BPRS, BMT, dan Koperasi Syariah.<sup>82</sup>

## **2. Deskripsi Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data yang digunakan dalam

---

<sup>82</sup> Muhammad Saleh, *Perbankan Syariah Dalam Teori*, (Bandung: Rajawali Pers, 2003), h. 22

penelitian ini diambil dari laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia yang diperoleh dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan website masing-masing perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* (runtun waktu) dari bank umum syariah di Indonesia yang memenuhi kriteria sampel selama periode 2012-2015. Daftar bank umum syariah yang memenuhi kriteria tersebut adalah:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Bank Umum Syariah**

No	Nama Bank
1	BCA Syariah
2	Bank Syariah BNI
3	Bank Syariah BRI
4	Bank Syariah Mandiri
5	Bank Syariah Bukopin
6	Bank Muamalat Indonesia
7	Bank Panin Syariah
8	Bank Victoria Syariah

Sumber: Totok Budisantoso dan Nuritomo<sup>83</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, standar deviasi, dan varians dari satu variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic social reporting* dan tiga variabel independen yaitu komposisi dewan komisari independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi. Hasil analisis dapat dilihat dari tabel 4.2.

---

<sup>83</sup> Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), h. 210

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DKI	32	.33	1.00	.6488	.14764
DPS	32	2.00	3.00	2.2812	.45680
DIREKSI	32	3.00	8.00	4.3125	1.06066
ISR	32	.37	.53	.4535	.04537
Valid N (listwise)	32				

Sumber: *Data sekunder diolah, 2017*

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas dapat diketahui sebagai berikut:

a. Komposisi dewan komisaris independen

Hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa komposisi dewan komisaris independen terendah yaitu 0.33 dan nilai tertinggi 1.00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0.33 hingga 1.00 dengan nilai mean 0.6488 dan nilai standar deviasi 0.14764.

b. Ukuran dewan pengawas syariah

Hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa ukuran dewan pengawas syariah terendah yaitu 2.00 dan nilai tertinggi 3.00. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 2.00 hingga 3.00 dengan nilai mean 2.2812 dan nilai standar deviasi 0.45680.

c. Ukuran dewan direksi

Hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa ukuran dewan direksi terendah yaitu 3.00 dan nilai tertinggi 8.00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 3.00 hingga 8.00 dengan nilai mean 4.3215 dan nilai standar deviasi 1.06066.

d. Pengungkapan *Islamic social reporting*

Hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa komposisi dewan komisaris independen terendah yaitu 0.37 dan nilai tertinggi 0.53. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0.37 hingga 0.53 dengan nilai mean 0.4535 dan nilai standar deviasi 0.4537.

## **2. Uji Kualitas Data**

### **a. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) pada uji normalitas data menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov*, dengan ketentuan jika nilai  $sig > \alpha$  (0.05) maka data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas:

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04212976
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.069
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.527
Asymp. Sig. (2-tailed)		.944
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji normalitas dengan *One sample Kolmogorov Smirnov* dapat diketahui bahwa nilai  $sig$  adalah  $0.944 > \alpha$  (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Artinya data dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

**b. Uji Homogenitas Data**

Uji homogenitas data adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varians yang

sama atau tidak. Hasil uji homogenitas data dapat dilihat dari tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Homoggenitas Data**

**Test of Homogeneity of Variance**

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
DKI	Based on Mean	.783	3	28	.513
	Based on Median	.873	3	28	.467
	Based on Median and with adjusted df	.873	3	22.989	.470
	Based on trimmed mean	.807	3	28	.501
DPS	Based on Mean	.396	3	28	.757
	Based on Median	.137	3	28	.937
	Based on Median and with adjusted df	.137	3	27.712	.937
	Based on trimmed mean	.396	3	28	.757
DIREK SI	Based on Mean	2.077	3	28	.126
	Based on Median	1.058	3	28	.383
	Based on Median and with adjusted df	1.058	3	13.784	.399
	Based on trimmed mean	1.879	3	28	.156
ISR	Based on Mean	1.146	3	28	.348
	Based on Median	.828	3	28	.489
	Based on Median and with adjusted df	.828	3	23.936	.491
	Based on trimmed mean	1.112	3	28	.361

Sumber: *Data sekunder diolah, 2017*

Berdasarkan tabel 4.4, terlihat bahwa nilai signifikan dari variabel komposisi dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan direksi dan pengungkapan *Islamic social reporting*

diatas 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa semua sampel memiliki varians yang sama atau semua data tersebut homogen.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas Data

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Ringkasan hasil uji multikolinearitas penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah berikut:

**Tabel 4.5**  
**Uji Multikolinearitas Data**

Coefficients<sup>a</sup>

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.676	1.479
.408	2.450
.535	1.869

a. Dependent Variable: ISR

Sumber: *Data sekunder diolah, 2017*

Berdasarkan tabel 4.5, dari hasil uji multikolinearitas, masing-masing variabel independen memiliki nilai VIF komposisi dewan komisaris 1.479 dan tolerance 0.676, ukuran dewan pengawas syariah 2.450 dan tolerance 0.408, ukuran dewan direksi

1.869 dan tolerance 0.535. Karena masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF  $< 10$  dan nilai Tolerance  $> 0.01$  maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat multikolinieritas antara variabel terikat dengan variabel bebas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas Data**

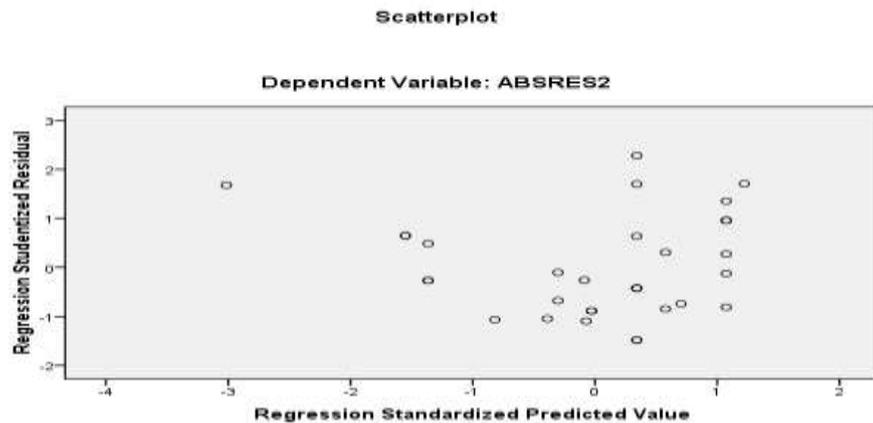
Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan pola gambar *scatter plot*. Pola gambar *scatter plot* dilihat dari pola penyebaran titik-titik datanya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>84</sup> Dasar pengambilan keputusan uji ini jika data membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka hal ini mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika data tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>85</sup> Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat seperti berikut:

#### **Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas**

---

<sup>84</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis...*, h. 139

<sup>85</sup> Danang Sunyoto, *Uji Khi Kuadrat dan Regresi untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 101



Sumber: *Data sekunder diolah, 2017*

Berdasarkan pola gambar *scatter plot*, dapat dilihat bahwa penyebaran titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdeteksi heteroskedastisitas

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan melihat nilai *Durbin Watson* dalam tabel pengambilan keputusan. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	Durbin-Watson
1	.371 <sup>a</sup>	2.517

a. Predictors: (Constant), DIREKSI, DKI, DPS

b. Dependent Variable: ISR

Sumber: *Data sekunder diolah, 2017*

Berdasarkan tabel 4.6 hasil pengujian diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2.517 dengan keputusan nilai DW berada pada angka 1 hingga 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dan data dalam penelitian ini layak digunakan.

#### 4. Uji Hipotesis Data

##### a. Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.607	.080		7.539	.000
DKI	-.103	.066	-.334	-1.566	.129
DPS	-.020	.027	-.201	-.732	.471
DIREKSI	-.009	.010	-.222	-.924	.363

a. Dependent Variable: ISR

Sumber: *Data sekunder diolah, 2017*

Dari tabel 4.7, diperoleh analisis regresi dan dapat disusun persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 0.607 - 0.103 X_1 - 0.020 X_2 - 0.009 X_3$$

Hasil perhitungan yang telah dilakukan menghasilkan persamaan yang menunjukkan besarnya nilai X merupakan regresi yang diestimasi sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta ( $\beta_0$ ) sebesar 0.607 artinya apabila, komposisi dewan komisaris independen ( $X_1$ ), ukuran dewan pengawas syariah ( $X_2$ ), ukuran dewan direksi ( $X_3$ ) dalam keadaan konstanta atau 0, maka pengungkapan *Islamic social reporting* (Y) nilainya sebesar 0.607.
- 2) Koefisien regresi  $X_1$  ( $\beta_1$ ) sebesar 0.103 artinya apabila, komposisi dewan komisaris independen mengalami kenaikan 1% maka pengungkapan *Islamic social reporting* akan turun sebesar 0.103 dengan asumsi bahwa variabel yang lain dari model regresi adalah tetap.
- 3) Koefisien regresi  $X_2$  ( $\beta_2$ ) sebesar 0.020 artinya apabila, ukuran dewan pengawas syariah mengalami kenaikan 1% maka pengungkapan *Islamic social reporting* akan turun sebesar 0.020 dengan asumsi bahwa variabel yang lain dari model regresi adalah tetap.
- 4) Koefisien regresi  $X_3$  ( $\beta_3$ ) sebesar 0.009 artinya apabila, ukuran dewan direksi mengalami kenaikan 1% maka pengungkapan *Islamic social reporting* akan turun sebesar 0.009 dengan asumsi bahwa variabel yang lain dari model regresi adalah tetap.

**b. Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Simultan**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		F	Sig.
1	Regression	1.492	.238 <sup>a</sup>
	Residual		
	Total		

a. Predictors: (Constant), DIREKSI, DKI, DPS

b. Dependent Variable: ISR

Sumber: *Data sekunder diolah, 2017*

Dari tabel 4.8 diperoleh nilai *Sig* sebesar  $0.238 > \alpha (0.05)$ . Hal ini menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada taraf ( $\alpha$ ) 5% dan tingkat kepercayaan 95%, artinya 95% dari 32 data menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kesimpulannya  $H_1$  ditolak.

**c. Uji Parsial (Uji t)**

Keputusan uji parsial hipotesis dibuat dengan ketentuan, jika tingkat signifikansi  $< 0.05$  maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.9**

## Hasil Uji Parsial

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.607	.080		7.539	.000
DKI	-.103	.066	-.334	-1.566	.129
DPS	-.020	.027	-.201	-.732	.471
DIREKSI	-.009	.010	-.222	-.924	.363

a. Dependent Variable: ISR

Sumber: *Data sekunder diolah, 2017*

Berdasarkan tabel 4.9, hasil uji t dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai signifikansi untuk komposisi dewan komisaris independen sebesar  $0.129 > \alpha (0.05)$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Hal tersebut berarti  $H_2$  ditolak.

### 2) Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai signifikansi untuk ukuran dewan pengawas syariah sebesar  $0.471 > \alpha (0.05)$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan

antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Hal tersebut berarti H<sub>3</sub> ditolak.

### 3) Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai signifikansi untuk ukuran dewan direksi sebesar  $0.363 > \alpha (0.05)$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Hal tersebut berarti H<sub>4</sub> ditolak.

## 5. Koefisien Determinasi ( Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi digunakan untuk memberikan presentase variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh seluruh variabel independen.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.371 <sup>a</sup>	.138	.045

a. Predictors: (Constant), DIREKSI, DKI, DPS

b. Dependent Variable: ISR

Sumber: *Data sekunder diolah, 2017*

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa nilai adjusted R<sup>2</sup> adalah sebesar 0.045, berdasarkan pedoman interpretasi koefisien determinasi hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel sangat lemah yaitu sebesar 0.045 atau hanya 4,5 %, maka dalam penelitian ini sebenarnya tidak perlu

dihitung koefisien determinasi karena tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen dan variabel dependen.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel komposisi dewan komisari independen, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan direksi secara bersama-sama tidak berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia, dengan nilai signifikansi sebesar  $0.238 > \alpha (0.05)$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komposisi dewan komisari independen, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan direksi secara bersama-sama tidak berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.

#### **2. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *ISR* dengan nilai signifikansi untuk komposisi dewan komisaris independen

sebesar  $0.129 > \alpha (0.05)$ , dengan kata lain komposisi dewan komisaris independen tidak mendorong adanya pengungkapan *ISR*.

Seperti yang dikemukakan oleh Amalia hal ini dikarenakan adanya kemungkinan pemilihan dan pengangkatan komisaris independen yang kurang efektif dan banyak anggota dewan komisaris yang tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya, sehingga fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga berapapun komposisi komisaris independen tidak akan mempengaruhi pengungkapan *ISR* suatu perusahaan.<sup>86</sup> Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Gestari pada tahun 2014, yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *ISR*.<sup>87</sup>

### **3. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *ISR* dengan nilai signifikansi untuk ukuran dewan pengawas syariah sebesar  $0.471 > \alpha (0.05)$  sehingga ukuran dewan pengawas syariah tidak mendorong adanya pengungkapan *ISR* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

---

<sup>86</sup> Amalia Ramdhaningsih, *Pengaruh Indikator Good Corporate Governance Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility*, E-Jurnal Akuntansi dikutip dari (<file:///C:/users/2017/downloads/5515-1-8837-1-10-20130511.pdf>, pada hari Kamis, 5 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB)

<sup>87</sup> Intan Gestari, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Skripsi dikutip <http://eprints.ums.ac.id/32066/9/10%20naskah%20publikasi.pdf>, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.50 WIB)

Firdaus menyatakan bahwa kurangnya peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi produk, kegiatan penghimpunan, pembiayaan dan kegiatan bank umum syariah lainnya, serta kurang memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dapat mempengaruhi pengungkapan terhadap laporan sosial perusahaan.<sup>88</sup> Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa Dipika tahun 2014 yaitu ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *ISR*.<sup>89</sup>

#### **4. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan *ISR* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *ISR* dengan nilai signifikansi untuk ukuran dewan direksi sebesar  $0.363 > \alpha (0.05)$  sehingga ukuran dewan direksi tidak mendorong adanya pengungkapan *ISR* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Menurut Frans Satrio Wicaksono, dewan direksi perusahaan yang kurang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan untuk kepentingan perusahaan dapat mempengaruhi kurangnya tingkat pengungkapan laporan

---

<sup>88</sup> Muhammad Firdaus, dkk. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16

<sup>89</sup> Nur Anisa Dipika, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2012)*, Skripsi dikutip dari ([http://digilib.uin-suka.ac.id/21239/2/12820029\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/21239/2/12820029_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf)), pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, Pukul 15.32 WIB)

sosial perusahaan berdasarkan entitas syariah.<sup>90</sup> Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vina Septiana Permatasari tahun 2015 yang menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*.<sup>91</sup>

##### **5. Besarnya pengaruh Komposisi Dewan Komisari Independen, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan *ISR* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**

Berdasarkan hasil uji determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa nilai adjusted  $R^2$  adalah sebesar 0.045. Jika dilihat dari pedoman interpretasi pada tabel 3.2 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel sangat lemah yaitu sebesar 0.045 atau 4.5%, sedangkan sisanya 95.5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model ini, maka dalam penelitian ini tidak perlu dihitung koefisien determinasi karena tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

---

<sup>90</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, (Malang: Visimedia, 2009), h. 52

<sup>91</sup> Vina Septiana permatasari, dikutip dari ([https://www.researchgate.net/publication/311970261\\_pengaruh\\_ukuran\\_perusahaan\\_profitabilitas\\_dan\\_ukuran\\_dewan\\_direksi\\_terhadap\\_indeks\\_islamic\\_social\\_reporting\\_pada\\_perusahaan\\_yang\\_terdaftar\\_dalam\\_jakarta\\_islamic\\_indeks\\_tahun\\_2011-2013](https://www.researchgate.net/publication/311970261_pengaruh_ukuran_perusahaan_profitabilitas_dan_ukuran_dewan_direksi_terhadap_indeks_islamic_social_reporting_pada_perusahaan_yang_terdaftar_dalam_jakarta_islamic_indeks_tahun_2011-2013), pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, Pukul 13.43 WIB)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang pengaruh komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012-2015. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai  $0.238 > \alpha (0.05)$ .
2. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012-2015. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai  $0.129 > \alpha (0.05)$ .
3. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun

2012-2015. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai  $0.471 > \alpha (0.05)$ .

4. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012-2015. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai  $0.363 > \alpha (0.05)$ .
5. Besar koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0.045 atau sebesar 4.5%. Hal ini berarti sebesar 4.5% pengungkapan *Islamic social reporting* dipengaruhi oleh komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi sedangkan sisanya 95.5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## **B. Saran-Saran**

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperbaharui data dan menambah sumber-sumber informasi pengungkapan lainnya sehingga lebih dapat menggambarkan kondisi perusahaan. Sumber informasi lainnya dapat diperoleh dari laporan-laporan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti koran, majalah, internet dan informasi lainnya.
2. Peneliti perlu menambahkan sampel yang lebih luas tidak hanya mencakup perusahaan perbankan syariah tetapi perusahaan lainnya misalnya seperti perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*, Indeks Saham

Syariah Indonesia, dan Daftar Efek Syariah. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki cakupan yang luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahzar, Fahri Ali., RinaTrisnawati. *Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah Indonesia*, Proceeding Seminar Nasional, dikutip dari (<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3798/46.%20hri%20ali%20ahzar%20%26%20rina%20trisnawati.pdf?sequence=1&isallowed=y>), pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017, Pukul 11.00 WIB.
- Aprianingsih, Astri. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014*.Jurnal, dikutip dari(<http://eprints.uny.ac.id/31985/1/skripsi.pdf>), pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, pukul 11.45 WIB.
- Arafat, Wilson. *Manajemen Perbankan Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2006.
- Asnaini, *et.al.* *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu. 2016.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Baidok, Wardatul dan Dina Fitriasia, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, Jurnal dikutip dari (<http://ejurnal.unair.ac.id/index.php/jestt/article/viewfile/3684/2509>, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2017, Pukul 14.15 WIB).
- Budisantoso, Totok., Nuritomo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Selemba Empat. 2014.
- Dipika, Nur Anisa. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2012)*, dikutip dari ([http://digilib.uinsuka.ac.id/21239/2/12820029\\_bab\\_iiv\\_atau\\_v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/21239/2/12820029_bab_iiv_atau_v_daftar-pustaka.pdf)), pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, pukul 15.32 WIB.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. *International Shari'ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA), Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi/ISRA*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Fahmi, Irham. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Firdaus, Muhammad, *et al.* *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2007.

- Firdaus, Muhammad. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Fitria, Soraya., Dwi Hartanti. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial (Studi: Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, dikutip dari (<http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5083>), pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.50 WIB.
- Gestari, Intan. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, dikutip dari (<http://eprints.ums.ac.id/32066/9/10%20naskah%20publikasi.pdf>), pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.50 WIB.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariates dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
- Kariza, Ayu. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting pada Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index*, Jurnal Akuntansi, dikutip dari ([ayuriza@gmail.com](mailto:ayuriza@gmail.com)), pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, pukul 11.23 WIB.
- Khoirudin, Amirul. *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, dikutip dari(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/2919>), diakses pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017, Pukul 11.15 WIB.
- Machmud, Amir., Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Maretha, Nadya., Anna Purwaningsih. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan*, Modus Vol.25, dikutip dari ([marethanadya@gmail.com](mailto:marethanadya@gmail.com)), pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, pukul 12.51 WIB.
- Murthado, Zaki., Arif Lukman Santoso. *Pengaruh Penghargaan dan Tipe Kepemilikan Bank Umum Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting*, Simposium Nasional Akuntansi XIX dikutip dari (<http://gondata.feb.unila.ac.id/gallery/wpcontent/uploads/2016/08/aksr-04-camera-ready-fullpaper-edit-isr-final-version-full-paper.pdf>), pada hari Senin, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.50 WIB.
- Nasir, Ahmad Amin. *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Perusahaan-Perusahaan*

yang Terdaftar pada Jakarta Islamic Indeks, Jurnal, dikutip dari ([http://digilib.uin-suka.ac.id/19166/2/08390164\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/19166/2/08390164_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf)), pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.55 WIB.

Permatasari, Vina Septiana. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Indeks Islamic Social Reporting pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam JII Tahun 2011-2013*, dikutip dari (<https://www.researchgate.net/publication/31197026>), pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, Pukul 13.43 WIB.

Pramesti, Getut. *Statistika Lengkap Secara Teori dan Aplikasi Dengan SPSS 23*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2016.

Purwanti, Ari. *Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa pada Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi dan keuangan Islam Vol. 4, No. 2 Tahun 2016, dikutip dari (<http://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/viewfile/63/60>), pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2017, Pukul 14.12 WIB).

Putri, Tria Karina. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2012*, dikutip dari ([http://eprints.undip.ac.id/429142914/1/05\\_putri.pdf](http://eprints.undip.ac.id/429142914/1/05_putri.pdf)), diakses pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017, Pukul 10.45 WIB.

Raditya, Amalia Nurul. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Sosial Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES)*, dikutip dari (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285671samilia%20nurul%20raditya.pdf>), pada hari Senin, tanggal 26 November 2016, Pukul 10.15 WIB.

Rama, Ali., Meliawati, *Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012*, dikutip dari (<http://eprints.ums.ac.id/47748/17/naskah%20publikasi%20%282%29.pdf>), pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, Pukul 12.51 WIB.

Ramadhaningsih, Amalia. *Pengaruh Indikator Good Corporate Governance pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility*, E-Jurnal Akuntansi, dikutip dari (<http://file:///c:/users/2017/downloads/5515-1-8837-1-10-20130511.pdf>), pada hari Kamis, 5 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB.

Rivai, Veithzal., Rifki Ismail. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka . 2013.

- Saleh, Muhammad. *Perbankan Syariah dalam Teori*. Bandung: Rajawali Pers. 2003.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametri untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Soesanto, Andi. dikutip dari <http://tipserbaseri.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-kegiatan-bank-umum.html>, pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.
- Suharto, Edi. *Memperkuat Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2007.
- Sunyoto, Danang. *Uji Khi Kuadrat dan Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Malang: Visimedia. 2009.
- Widiawati, Septi. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011*, dikutip dari (<http://eprints.undip.ac.id/37231/1/Widiawati.pdf>) pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, Pukul 17.14 WIB.
- Wijaya, Tomy. *Cepat Menguasai SPSS 19 untuk Olah dan Interpretasi*. Yogyakarta: Cahaya Atma. 2011.
- Yamin, Sofyan., Heri Kurniawan. *SPSS Complete "Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS"*. Jakarta: Selemba Infotek. 2009.